

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem *trias politica* terdiri lembaga Eksekutif (pelaksana undang-undang), Legislatif (pembuat undang-undang), dan Yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang) dengan bentuk pemerintahan demokrasi dimana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan kebijakan dan penentuan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Semestinya gagasan pokok dari suatu pemerintahan demokrasi menjunjung tinggi hakikat manusia yang diyakini memiliki hak dan kemampuan sama dalam konteks sosial serta dapat mensejahterahkan seluruh warga negara. (Budiarjo Miriam, 2009)

Salah satu lembaga paling sentral perannya pada sistem demokrasi adalah lembaga legislatif yang termasuk di dalamnya ada DPR (dewan perwakilan rakyat) untuk nasional dan DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) untuk daerah. Diantara fungsi umum baik pada DPR RI maupun DPRD menurut (UUD 1945 pasal 20 ayat 1) adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Meski mempunyai peran penting, namun sejauh ini kinerja DPR RI maupun DPRD kota/kabupaten dinilai jauh dari kata memuaskan. Dalam konteks daerah salah satunya yaitu Kota Malang, DPRD yang merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah menurut masyarakat kinerjanya juga dirasa kurang maksimal dan justru lebih banyak mengedepankan kepentingan pribadi. (Dalam <https://mcw-malang.org/sikap-masyarakat-terhadap-kasus-korupsi-di-kota-malang-yang-menimpa-dprd/> diakses pada tanggal 10 Mei 2019).

Kondisi yang ada sekarang dengan tidak berjalannya fungsi lembaga legislatif yang berdampak pula pada sistem demokrasi, setidaknya ada beberapa sikap masyarakat terhadap para anggota DPRD Kota Malang yang harus dimunculkan yaitu : 1) Partisipasi Politik, adalah komponen penting demi berlangsungnya sistem demokrasi yang terbuka. Menurut (Hungtinton dan Nelson, 2004) masyarakat dituntut berpartisipasi aktif dalam berbagai macam bentuk partisipasi politik diantaranya : a) Kegiatan pemilihan, berkaitan dengan kegiatan proses pemungutan suara. b) *Lobby*, bentuk kegiatan berupa masukan atau saran yang bertujuan mempengaruhi keputusan. c) *Contacting*, atau menambah jejaring pejabat publik atau pemerintahan. Dengan ditingkatkannya partisipasi politik pada masyarakat kota Malang akan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah

atau lembaga publik lainnya sehingga berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. 2) Kepercayaan (*Trust*) terhadap DPRD kota Malang merupakan hal yang penting. Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, kepercayaan (*trust*) masyarakat juga dapat diartikan sebagai tindakan evaluasi pada pemerintahan atau nilai dan norma yang diharapkan dalam aturan administratif. (Damsar, 2010).

Pada tahun 2018 dunia perpolitikan di Indonesia kembali ternoda, kasus korupsi massal pada jajaran institusi pemerintahan terjadi di kota Malang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015 dengan melibatkan Wali Kota nonaktif Moch Anton dan membuat roda pemerintahan Kota Malang lumpuh sementara. Kasus ini sendiri terdiri dari 3 tahap. Pada tahap pertama di tahun 2017, KPK menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Ketua DPRD Malang saat itu, M Arief Wicaksono dan Kadis PUPPB Malang saat itu, Jarot Edy Sulistiyono. (dikutip dari <https://www.nasionalkompas.com/indonesia-1724291> Diakses pada tanggal 26 April 2019).

Fenomena tersebut menyebabkan terbentuknya persepsi masyarakat terhadap DPRD kota Malang cenderung negatif. Hal tersebut disebabkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara harapan masyarakat dengan kinerja DPRD. Keberadaan lembaga DPRD dengan masyarakat digambarkan dengan satu kelompok yang mempunyai tujuan sama, dalam konteks sistem demokrasi eksistensi kedua elemen tersebut sangat diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan. Menanggapi fenomena korupsi massal yang menjerat wakil rakyatnya, sebagian besar sikap warga kota Malang adalah 1) Merasa kecewa dan malu mempunyai anggota dewan seorang koruptor, 2) buruknya persepsi publik disinyalir dapat memunculkan sikap apatisisme serta menurunkan partisipasi politik karena masyarakat menganggap keberadaan lembaga DPRD tidak berdampak pada kehidupannya, 3) rendahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap DPRD kota Malang. (Dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=F-L6eBx9jig> diakses pada tanggal 10 Mei 2019).

Jika fenomena tersebut dikaitkan dengan teori kohesi kelompok secara umum dapat dijelaskan bagaimana seharusnya DPRD dengan masyarakat mampu membentuk ikatan emosional, keakraban, dan solidaritas sehingga dapat mempertahankan kelompok yang utuh (Walgito B, 2002). Menurut (Bimo W, 2002) mendefinisikan kohesi kelompok sebagai sejumlah faktor yang mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota kelompok tersebut.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dari kelompok adalah dengan menjaga kepercayaan satu sama lain. Dalam konteks dunia politik *trust* merupakan modal utama dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat, dimana dalam bentuk

norma masyarakat melakukan evaluasi atau menyuarakan nilai-nilai yang diharapkan dalam aturan administratif, hubungan timbal balik antara pejabat dengan rakyat jika berjalan dengan baik akan pula menghasilkan kinerja yang baik pula. keadaan seperti ini disebut sebagai *political trust*. (Colquitt, J. A, 2007).

Ada beberapa faktor–faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik (*political trust*) diantaranya : 1) *Self interest*, bahwa sikap politik yang dimiliki seorang individu adalah hasil dari persepsi yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan ketertaikan. (Kumlin, 2004) 2) *Distirbutive justice*, merupakan persepsi masyarakat mengenai keadilan yang didasari atas pembagian sumber daya yang merata. 3) *Procedural Justice* merupakan pandangan masyarakat mengenai keadilan dan kebebasan yang sama dalam partisipasi politik. (Rawls, 1971). Aspek terpenting dalam terbentuknya kepercayaan politik (*political trust*) ialah persepsi masyarakat terhadap pejabat pemerintah. Persepsi merupakan proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu. (Citrin dkk,1999).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti berasumsi bahwa persepsi terhadap kasus korupsi berhubungan dengan *political trust* masyarakat. Dengan adanya persepsi negatif terhadap kasus korupsi , maka kepercayaan politik (*political trust*) pada masyarakat semakin menurun. Kepercayaan masyarakat atau *trust* dalam sebuah dunia perpolitikan harus terbangun terlebih dahulu, kurangnya *trust* dari masyarakat menyebabkan menurunnya kinerja para legislator. Sedangkan untuk anggota legislator harus meningkatkan dan mengedepankan integritas, tanggung jawab maupun moral agar kedua pihak baik masyarakat atau para legislator terjadi hubungan timbal balik antara pejabat dengan rakyat jika berjalan dengan baik akan pula menghasilkan kinerja yang baik pula.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada masalah dalam kinerja anggota legislatif khususnya DPR. Misalnya saja, legislator tidak dapat menghasilkan *output* yang suportif untuk perbaikan kehidupan publik dan justru lebih sibuk mengkompromikan kepentingan pribadi maupun kelompok, ditambah dengan persepsi buruk masyarakat mengenai anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. *Trust* pada masyarakat akan memburuk apabila anggota DPR tidak mampu menjaga tanggung jawab dan integritasnya, begitu juga sebaliknya jika anggota DPR dapat menjaga tanggung jawab dan memperbaiki integritasnya maka *political trust*

pada masyarakat menjadi baik. Sehingga kedua hal tersebut saling berkaitan. Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hubungan antara persepsi terhadap kasus korupsi massal DPRD dengan *political trust*. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kasus korupsi massal DPRD dengan kepercayaan politik (*political trust*)?”.

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem *trias politica* terdiri lembaga Eksekutif (pelaksana undang-undang), Legislatif (pembuat undang-undang), dan Yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang) dengan bentuk pemerintahan demokrasi dimana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan kebijakan dan penentuan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Semestinya gagasan pokok dari suatu pemerintahan demokrasi menjunjung tinggi hakikat manusia yang diyakini memiliki hak dan kemampuan sama dalam konteks sosial serta dapat mensejahterahkan seluruh warga negara. (Budiarjo Miriam, 2009)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kasus korupsi massal DPRD dengan kepercayaan politik (*political trust*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran dan informasi bagi penelitian ilmiah tentang hubungan persepsi terhadap kasus korupsi dengan kepercayaan politik (*political trust*)

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

##### **a. Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat menyadari perannya dalam sistem demokrasi yang sangat penting serta menyadari tentang penyebab dan dampak perilaku korupsi, sehingga dapat menjaga kepercayaan politik (*political trust*) nya.

b. Lembaga DPRD

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk memikirkan dan mencari solusi terkait dengan diharapkan dapat menambah informasi serta menjadi acuan anggota legislator dalam mengatasi permasalahan persepsi kurang baik dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga dewan perwakilan rakyat (DPR).

c. Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini dapat membantu peneliti lain untuk menambah wawasan tentang hubungan persepsi terhadap kasus korupsi dengan kepercayaan politik (*political trust*) serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian karya ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian yang sejenis selanjutnya.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, karena terdapat tingkat kesamaan pada variabelnya. Ada pun penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini diantara lain sebagai berikut :

1. Diana C Mutz (2005) dengan judul "*The New VideoMalaise : Effects of Televised Incivility on Political Trust*". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara tayangan televisi yang menayangkan konflik para elit politik dengan kepercayaan politik masyarakat kenapa mahasiswa tidak / kurang percaya terhadap politisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara konflik politik yang ditayangkan televisi terhadap kepercayaan politik masyarakat..
2. Patricia May (2001) dengan judul "*Media Effects on Political and Social Trust*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara pengaruh media cetak dan pengaruh media elektronik terhadap kepercayaan politik warga Amerika. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan media cetak hanya mempengaruhi kehidupan sosial warga Amerika saja, sedangkan media elektronik dapat mempengaruhi kepercayaan politik warga.
3. Tianjian Sui (2001) dengan judul "*Media Effects on Political Confidence and Trust in The Peoples of China*". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak propaganda pemerintah komunis terhadap sikap

masyarakat dan lembaga – lembaga politik tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek propaganda yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik melalui tayangan berita di China memiliki efek negatif pada sikap masyarakat dan terhadap institusi politik.

4. Ju Young Kim (2005) yang berjudul “*Bowling Together isn’t a Care – All : The Relationship Between Social Capital and Political Trust in South Korea*”. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi umum lembaga – lembaga politik mempengaruhi kepercayaan politik dan mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap sistem politik serta kecenderungan seseorang untuk menyetujui seorang petahana.
5. Johan Wahyudi, Mirra Noor Milla, Hamdi Muluk (2017) berjudul “persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal sebagai prediktor kepercayaan politik pada mahasiswa di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu faktor apa di antara variabel persepsi terhadap keadilan sosial atau variabel kepercayaan interpersonal yang paling mempengaruhi kepercayaan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik keadilan sosial maupun kepercayaan interpersonal sama – sama berpengaruh terhadap kepercayaan politik.

Perbedaan mendasar ke lima penelitian diatas dengan penelitian ini ialah terdapat pada *independent variabel* yang digunakan, jika pada penelitian sebelumnya bahwa kepercayaan politik (*political trust*) lebih banyak dipengaruhi oleh pemanfaatan media. Pada penelitian ini melihat fenomena di suatu kota di Indonesia bahwa kasus korupsi massal yang dilakukan DPRD berhubungan pula dengan kepercayaan politik (*political trust*) masyarakatnya.